

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi sekarang ini pembangunan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari level pemerintahan yang ada. Untuk mewujudkan kinerja pemerintahan yang baik sangat dibutuhkan perubahan-perubahan paradigma yang mendasar, dari sistem lama yang serba terpusat, dimana pemerintah pusat sangat dominan dalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam proses pembangunannya.

Dalam pemikiran tersebut pemerintah daerah membutuhkan suatu sistem yang dapat mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan tersebut dari pemerintah pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu bersaing baik secara regional, nasional maupun internasional.

Otonomi daerah yang seluas-luasnya diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bertujuan untuk memaksimalkan kemampuan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya dan berhasil guna dalam menyelenggarakan proses pemerintahannya.

Keuangan daerah saat ini sangat membutuhkan pengelolaan akuntansi sektor publik. Suatu daerah akan berkembang menjadi daerah yang kuat ekonomi dan berkuasa serta mampu mengembangkan potensinya, harus dapat mengelola keuangan daerahnya dengan baik. Atau saja suatu daerah bisa saja menjadi daerah yang tidak berdaya apabila dalam pengelolaan keuangannya tidak baik. Keuangan daerah yang dilakukan harus dikelola secara efektif, efisien, partisipatif,

transparansi, dan akuntabel, sehingga mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat yang selanjutnya dapat mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan suatu daerah.

Tanggung jawab yang diberikan kepada pemerintah daerah merupakan tanggung jawab dalam melaksanakan segala urusan pemerintah daerah mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan tahapan evaluasi, terkecuali urusan politik luar negeri, pertahanan dan keamanan.

Hak otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yaitu menentukan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah yang dimiliki, dimana tujuannya antara lain untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memantau dan mengontrol penggunaan dana tersebut, selain itu dapat menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan harus mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sumber-sumber penerimaan, misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan potensi-potensi lain yang ada khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan operasional pemerintahan dan pembangunan daerah. Anggaran berbasis kinerja tidak hanya didasarkan pada kebutuhan dan keseimbangan, akan tetapi didasarkan pada tujuan tertentu yang pelaksanaannya berfokus pada efektivitas dan efisiensi penggunaannya. Dengan adanya penganggaran berbasis kinerja, pada kenyataannya masih dijumpai penggunaan anggaran yang kurang efektif dan efisien. Kegiatan

seperti belanja makanan dan minuman rapat, belanja cetak, belanja pakaian dinas yang telah dianggarkan sudah dilaksanakan dengan baik, akan tetapi masih ada saja kurang efektifnya realisasi anggaran, misalnya tujuan awal dianggarkan untuk pengadaan/pembelian alat komputer baru tetapi realisasi anggaran tersebut dipergunakan untuk pembelian/pengadaan alat tulis kantor dan belanja listrik yang melebihi kebutuhan atau tidak sesuai dengan standar sehingga terjadinya pemborosan anggaran pada saat penyusunan anggaran.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa ingin mengetahui lebih jauh dan mengkaji dalam suatu penelitian dengan judul yaitu **Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Pada Kantor Kelurahan Kasiguncu Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah : Apakah realisasi anggaran pada kantor Kelurahan Kasiguncu sudah Efektif dan Efisien?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pada Kantor Kelurahan Kagisuncu Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka yang menjadi manfaat penelitian sebagai berikut :

- 1.4.1. Sebagai sumbangsih pemikiran bagi Pemerintah Daerah khususnya Kelurahan Kasiguncu Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso;
- 1.4.2. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian;
- 1.4.3. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sintuwu Maroso Poso.

